



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 -2026



**TANJUNG BALAI KARIMUN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Renstra memuat Visi, Misi Kepala Daerah Terpilih serta Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tanjung Balai Karimun, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**



Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH. M.App. Sc
Pembina Utama Muda
NIP.196710031992031010



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD	II-13
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-13
2.2 Sumber Daya	II-19
2.3 Kinerja Pelayanan	II-21
2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-24
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-28
BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis	III-31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	III-42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	III-47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-48
BAB IV Tujuan dan Sasaran	IV-50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	IV-50



BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	V-54
	5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	V-54
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-56
BAB VII	Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan	VII-70
BAB VIII	Penutup	VIII-73



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	II-22
Tabel 2.2 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	II-23
Tabel 2.3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka	II-25
Tabel 2.4 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja	II-25
Tabel 2.5 : Capaian Indikator Kinerja Perindustrian	II-27
Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan PD	III-34
Tabel 3.2 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan	III-40
Tabel 3.3 : Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	III-46
Tabel 3.4 : Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD	III-47
Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	IV-53
Tabel 5.1 : Strategi dan Arah Kebijakan	V-55
Tabel 6.1 : Rencana Program, Indikator Kinerja Disertai Pendanaan	VI-57
Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	VII-71
Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dokumen Perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2021 - 2026 dengan mengacu pada kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten Karimun, serta memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah. Perumusan Rancangan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 secara pokok didasari pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun untuk tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun Masa Bhakti 2021-2026, maka Visi dan Misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karimun.

Perangkat Daerah (PD) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan kebijakan organisasi yang diselaraskan dengan Visi dan Misi RPJMD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap



Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah mengeluarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rancangan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 - 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Renstra Dinas



Tenaga Kerja dan Perindustrian ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang



- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I-5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



- Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 927);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karimun Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
 35. Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);
 36. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra) Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karimun.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk kurun waktu tahun 2021- 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja mengikuti ketentuan sistematika dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

a. Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

b. Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4 Sistematika Penulisan

c. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang



dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya,

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan RenstraPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Mengemukakan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertetangga/saling



mempengaruhi.

- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD. Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi
Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD yang selanjutnya mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Mengemukakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah berupa dampak/impact. Untuk mencapai tujuan, diperlukan alat ukur/indikator yang dapat memperlihatkan ketercapaian tujuan selama lima tahun. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap PD.
- 4.2. Sasaran Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Mengemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah PD yang merupakan impact/dampak yang ingin dicapai oleh kepala perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan PD



dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Program ditujukan untuk menjawab strategis, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Memuat indikator kinerja perangkat daerah. termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian tugas Dinas Daerah Kabupaten Karimun, yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan dan Perindustrian, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun adalah Aparatur Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang tenaga kerja yakni :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- b. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pembangunan dibidang tenaga kerja dan Perindustrian;
- c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- d. Melaksanakan kegiatan lain dibidang tenaga kerja dan Perindustrian yang ditugaskan oleh Bupati.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan Teknis dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan kegiatan dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;



- e. Pengkordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja

Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis operasional penyiapan dan pembinaan teknis hubungan industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan serta pengupahan, dengan uraian tugas yakni :

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional perencanaan pelaksanaan hubungan industri, syarat dan norma kerja;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan hubungan industri dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang terhadap pelaksanaan penyiapan dan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas lain di bidang Hubungan industrial yang ditugaskan oleh Kepala Bidang hubungan Industri, Syarat dan Norma kerja.

Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Seksi Syarat dan Norma Kerja.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja.

4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang penempatan dan perluasan kerja dalam negeri dan luar negeri, dengan uraian tugas yakni :

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja dalam negeri;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis penempatan dan perluasan kerja luar negeri;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penempatan dan perluasan kerja.
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang penempatan dan perluasan kerja yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri;
- b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja.

5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan uraian tugas yakni :

- a. Penyusunan program kerja pada seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi pembinaan teknis pelatihan tenaga kerja;



- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis fasilitas, koordinasi pembinaan teknis produktivitas tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di tugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari :

- a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
- b. Seksi Produktivitas Tenaga kerja.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

6. Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Industri membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempersiapkan bahan dan merumus kebijakan teknis, operasional, bimbingan usaha, sarana produksi pengawasan dan pengembangan usaha di bidang industri, dengan uraian tugas yakni :

- a. Melakukan perencanaan teknis operasional dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha industri;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan usaha industri makanan, minuman, agro, hasil hutan, kerajinan, logam, mesin,elektronika dan aneka industri.
- c. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan industri dan pengembangan usaha industri;
- d. Pelaksanaan pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dibidang industri;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait untuk kelancaran tugas-tugas pembinaan, pengawasan dan pengembangan indutri.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain di bidang perindustrian yang ditugaskan oleh kepala dinas.



Bidang Industri terdiri dari :

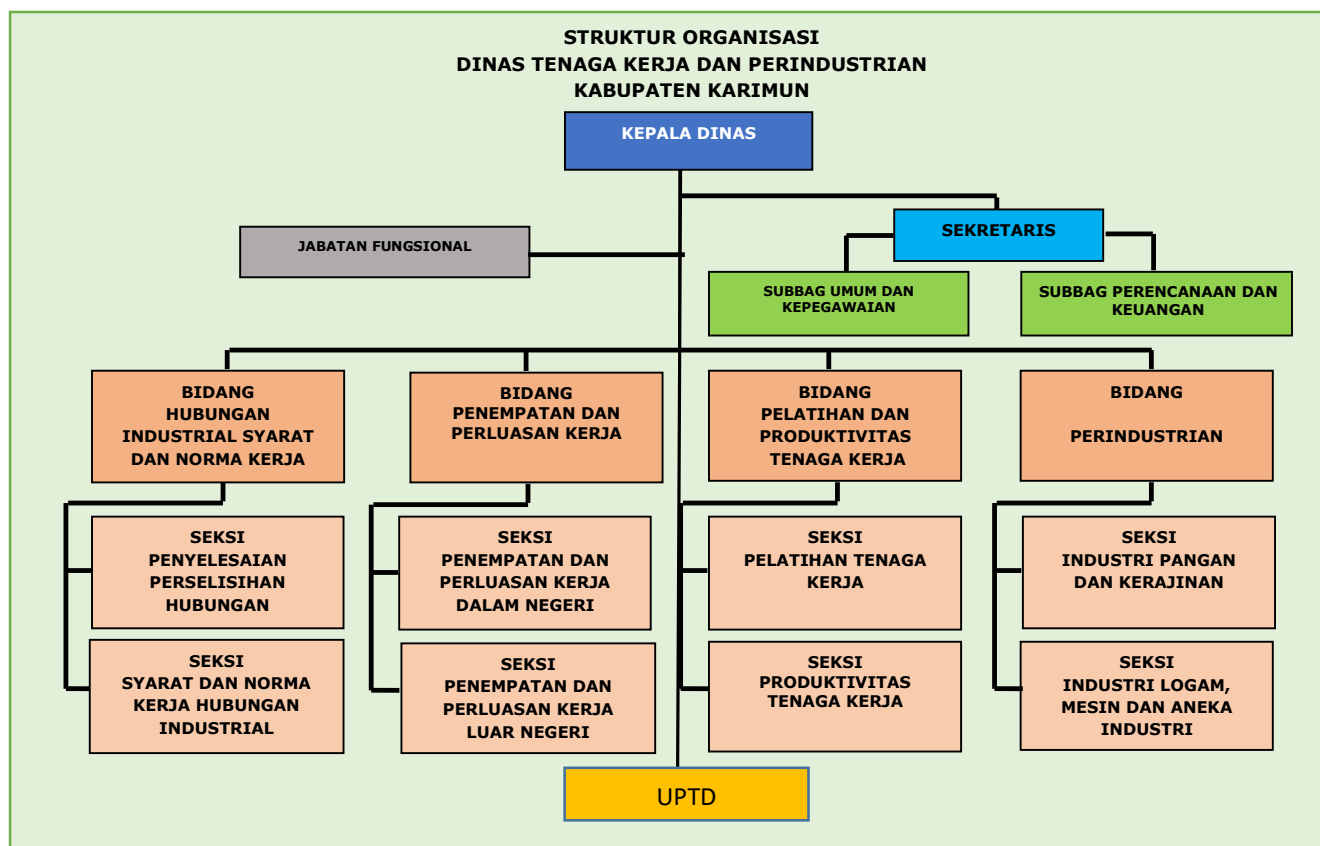
- a. Seksi Industri Pangan dan Kerajinan.
- b. Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka Industri.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, yang melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana dijabarkan di bawah ini :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Hubungan Industrial, Syarat dan Norma Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - b. Seksi Syarat dan Norma Kerja.
4. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri.
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.
5. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja.
 - b. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
6. Bidang Industri yang terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Pangan dan Kerajinan.
 - b. Seksi Industri Industri Logam, Mesin dan Aneka Industri.



2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sampai dengan awal tahun 2021 adalah 51 orang yang terdiri dari:

1	PNS	:	25 Orang
2	CPNS	:	1 Orang
3	Kontrak Pemda	:	18 Orang
4	Kontrak Dinas	:	8 Orang
	Jumlah	:	51 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a dan tabel di bawah ini :

Tabel a - Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan



Gol.	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	5	-	-	-	5
III	16	-	-	-	16
IV	4	-	-	-	4
Tenaga Kontrak	-		18	8	26
TOTAL	25		18	8	51

Tabel b - Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
Laki-Laki	9		18	5	24
Perempuan	16		8	3	27
TOTAL	25		26	8	51

Sedangkan penugasannya ke sub unit sebagai berikut:

1	Sekretariat	:	17 Orang
2	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja	:	10 Orang
3	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja	:	7 Orang
4	Bidang HI, Syarat dan Norma Kerja	:	8 Orang
5	Bidang Industri	:	9 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan:

1	Eselon II B	:	1 Orang
2	Eselon III A	:	1 Orang
3	Eselon III B	:	2 Orang
4	Eselon IV A	:	10 Orang
5	Eselon IV B	:	- Orang



6	Pejabat Fungsional	:	- Orang
	a) Arsiparis	:	- Orang
	b) Pengantar Kerja	:	- Orang
	c) Instruktur	:	- Orang
	d) Mediator	:	- Orang
7	Pelaksana	:	37 Orang

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study pegawai adalah sebagai berikut (table c dan table d)

Tabel c - Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	CPNS	Kontrak Pemda	Kontrak Dinas	Jumlah
Strata-2 (S2)	5				5
Strata-1 (S1)	12		3	2	17
D4	-				0
Sarjana Muda/D3	1		3		3
D1, D2	-				-
SLTA/SMK	5		12	5	22
SLTP					0
SD					0
TOTAL	23		18	7	51

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

Tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :



Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realiasi					Capaian				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen			59,82	60,19	60,45	60,71	60,96	62,75	63,23	63,31	58,09	59,76	104	105,05	105	95,68	98,00
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja Lokal	Persen			3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	2,45	2,07	3,7	3,29	3,77	72,05	59,14	103	88,92	99,21
3	Tingkat Pertumbuhan Wirasusahabaru	Persen			2	4	8	11	13	1,87	3,24	6	7,30	25,36	93,5	81,25	75	66,36	195,07
4	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja yang berkompeten	Persen			13,77	14,3	14,8	15,4	15,9	12,75	21,5	16,1	16,92	0	92,59	150,4	108	110	0
5	Persentase Penurunan Angka Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)	Persen			24	25	27	29	30	35	40	33	58,3	20	145	160	122	201	150
6	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen			33,5	34,3	34,7	35	35,4	34,2	35,4	29,1	41,38	86,70	102	103	83,7	118	244,91



Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja															
A. Belanja Tidak Langsung															
- Belanja Pegawai	2,935,558,000	2,894,106,452	2.783.257.796	3.656.240.980	3.188.694.976	2,698,971,284	2,548,510,739	2.262.006.638	3.200.144.749	3.055.659.724	91,94%	88,06%	81,27%	87,52%	95,82%
B. Belanja Langsung															
- Belanja Pegawai	4,851,342,000	6,577,110,546	2.783.257.796	3.656.240.980	1.070.134.000	4,764,629,896	6,109,169,027	2.262.006.638	3.200.144.749	979.320.000	98,77%	92,86%	81,27%	87,53%	91,51%
- Belanja Barang Jasa			1.118.380.000	2.958.346.800	2.013.404.500			1.082.785.000	2.888.972.432	1.687.094.365			96,82%	97,65%	83,79%
- Belanja Modal			14.500.000	34.077.600	48.241.300			14.500.000	34.077.600	48.241.300			100%	100%	100%

2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

➤ Ketenagakerjaan

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Masalah pengangguran juga terkait dengan kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, disamping permasalahan kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk itu, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan perlu terus didukung. Jumlah angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan/peluang kerja dan pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan juga berdampak pada tingkat pengangguran. Disamping itu, masih diperlukan pembinaan yang baik kepada para perusahaan agar pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dapat dikurangi. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan peluang untuk berwiraswasta/menciptakan lapangan kerja merupakan isu yang perlu diperhatikan dalam rangka pembangunan bidang ketenagakerjaan kedepan. Berdasarkan data dari BPS Provinsi dan BPS Nasional, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karimun selama 5 tahun lebih rendah dari TPAK Provinsi dan TPAK Nasional. Rendahnya TPAK ini dikarenakan tingginya angka penduduk usia 15 tahun ke atas yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah, mengurus rumah tangga maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi, seperti kaum lansia. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karimun cukup fluaktif dari tahun 2016 sebesar 2,52 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 5,70 persen, tahun 2018 turun menjadi sebesar 2,91 persen, tahun 2019 naik menjadi 5,46 persen dan tahun 2020 naik menjadi 8,36 persen.

Tabel 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional 2015 – 2020

No	Komponen	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TPAK Kabupaten Karimun	59,24	-	63,23	63,31	58,09	59,76
2	TPAK Provinsi Kepri	65,07	65,93	66,41	64,72	64,76	66,28
3	TPAK Nasional	65,76	66,34	66,67	67,31	67,53	67,77
4	TPT Kabupaten Karimun	5,69	-	5,70	2,91	5,46	8,36
5	TPT Provinsi Kepri	6,20	7,69	7,16	7,12	6,91	10,34
6	TPT Nasional	6,18	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07

Sumber: BPS Kepulauan Riau Tahun 2021

Sedangkan untuk permasalahan perburuhan yang terjadi selama 5 tahun antara pengusaha dan pekerja sangat berfluktuatif pada tahun 2016 terdapat 24 sengketa dan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 11, tahun 2017 sebanyak 20 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 10 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 17 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi 18 dan 7 sengketa dan yang diselesaikan dengan PB sebanyak 11 dan 5 kasus.

Tabel 2.4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tenaga Kerja Kabupaten Karimun Tahun 2015 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk 15 Th + (jiwa)	155,137	155,804	147,456	163,003	165,892	175,826
2	Angkatan Kerja	91,902	91,902	100,824	103,200	96,359	105,081
3	Bukan Angkatan Kerja	63,235	63,902	46,632	59,803	69,533	70,745
5	Tingkat Kesempatan Kerja	55,87	55,63	64,48	61,76	58,09	91,63
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	2,52	6,04	6,03	6,03	8,36
7	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun	17	24	20	17	18	7
8	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	6	11	10	5	11	5
9	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	866	2236	274	293	529	1545

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Besaran Pekerja/ Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	9,498	11,682	12,876	12,637	NA	17,434
11	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	NA	146	137	93	11	0
12	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	NA	NA	10	20	0	20

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, diolah

Untuk menekan angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

➤ Perindustrian.

Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kegiatan industri di Kabupaten Karimun yang potensial dikembangkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam KPBPB dan di luar KPBPB. Adapun pilar pembangunan industri di dalam KPBPB yaitu kawasan industri campuran, kawasan industri strategis kabupaten padat karya dan berorientasi export (manufaktur), serta kawasan yang diperuntukan bagi pergudangan berupa kawasan storage. Pembangunan kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi dengan pendekatan konsep efisiensi, tata ruang dan lingkungan hidup. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Karimun antara lain kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup.

Sedangkan kegiatan industri di luar KPBPB diarahkan pada usaha industri mikro, kecil dan menengah yang terkait dengan potensi wilayah, juga industri rumah tangga seperti pengolahan makanan dan barang-barang kerajinan. Industri ini mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Karimun agar produk yang dihasilkan memiliki nilai lebih dan mampu bersaing dengan produk serupa yang berasal dari daerah lain.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang inovatif dan terampil, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, peningkatan akses pasar dan bahan baku, serta promosi dan pameran produk unggulan. Persentase kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan dan bantuan sarana prasarana produksi sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 adalah sebanyak 66 persen baik dalam skala sentra ataupun Kelompok Usaha Bersama (KUB). Akan tetapi pada tahun 2020 cakupan pembinaan hanya mencapai 48,15 persen. Sama dengan sektor perdagangan, sektor industri juga memiliki peran yang cukup penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karimun. Kontribusi sektor perindustrian terhadap perekonomian di Kabupaten Karimun cukup baik, termasuk kedalam lima industri penopang ekonomi Kabupaten Karimun, meskipun sejak tahun 2016, kontribusi industri dalam PDRB semakin mengecil. Pada tahun 2016 kontribusi sektor industri pengolah sebesar 14,32 persen, maka dalam lima tahun terakhir atau pada tahun 2020 kontribusinya menurun hingga 12,71 persen. Secara umum sektor industri masih menghadapi beberapa masalah diantaranya: status IKM yang berijin masih terbatas. perkembangan industri kecil yang belum maksimal. kualitas industri yang belum sesuai standar. dan masalah Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
----	-----------	------	------	------	------	------



1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	14,32	14,18	13,54	13,14	12,71
2.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	6,70	5,21	1,20	2,48	-5,00
3.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	NA	66 %	66 %	66 %	48.15 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, BPS Kabupaten Karimun, Tahun 2021

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya kebijakandan program prioritas Bupati/Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 3) Adanya mekanisme kerja/SOP layanan ketenagakerjaan dan perindustrian yang terstandarisasi.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia yang melaksanakan beberapa fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 6) Tersedianya anggaran sebagai penunjang kegiatan.

KELEMAHAN (W):

- 1) Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian,
- 2) Masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang kerja



- 3) Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerjaan dan perindustrian.
- 4) Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal serta mudah diakses oleh masyarakat/pencari kerja.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) Letak Kabupaten Karimun yang strategis berdekatan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia.
- 2) Besarnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karimun
- 3) Adanya pelabuhan Embarkasi TKI.
- 4) Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan dan perindustrian jangka waktu 5 tahun kedepan.

ANCAMAN (T):

- 1) Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karimun.
- 2) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karimun.
- 3) Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Karimun yang sesuai dengan standar perusahaan/industri.
- 4) Masih adanya kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi.
- 5) Sangat bersinggungan dengan persoalan hukum dalam penanganan kasus perselisihan HI.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Strategi S-O

- 1) Pembinaan kepada organisasi ketenagakerjaan
- 2) Pelatihan SDM (PNS) di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian
- 3) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja
- 4) Meningkatkan retribusi ketenagakerjaan



2. Strategi W-O

- 1) Pembinaan lembaga pelatihan swasta
- 2) Membuat jaringan/ sistem informasi ketenagakerjaan dan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 4) Optomalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensi swadaya masyarakat

3. Strategi S-T

- 1) Menurunkan jumlah fakir miskin
- 2) Menurunkan jumlah pengangguran terbuka
- 3) Meningkatkan keterampilan pencari kerja
- 4) Perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal
- 5) Peningkatan keselamatan pencari kerja.
- 6) Peningkatan Hubungan industrial yang harmonis
- 7) Hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
- 8) Peningkatan fasilitas perbaikan taraf hidup pekerja
- 9) Pembinaan organisasi pekerja

4. Strategi W-T

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan ketenagakerjaan dan Perindustrian
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan kerja.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penciptaan lapangan kerja
- 4) Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan tenaga kerja.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan beberapa sumber, pertama berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Karimun, yang kedua bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, dan ketiga didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan dan perindustrian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2021-2026. Beberapa permasalahan di Kabupaten Karimun yang perlu ditangani pada periode tahun 2021-2026 berdasarkan pendekatan pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan terkait Sekretariat**1) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun namun menjadi tantangan bagi seluruh daerah di penjuru Indonesia. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan

dicapai.

2) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik

Berbagai kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh Pelayanan sesuai dengan haknya merupakan tugas bagi instansi pemerintahan untuk menyediakan kepentingan publik (masyarakat). Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik harus diupayakan mudah untuk diakses. Sebagai wilayah kepulauan, hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Karimun khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Perlu inovasi dan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengatasi permasalahan akses. Selain jarak dan waktu, kinerja dari aparat pemerintah, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, lokasi, dan fasilitas juga menentukan kualitas pelayanan publik yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Beberapa pemberitaan media massa masih memuat kurangnya pelayanan publik di Kabupaten Karimun, seperti terlambatnya petugas dan penyelesaian urusan.

3.1.2 Permasalahan terkait Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pelatihan dan Produktivitas serta Bidang Penempatan Tenaga Kerja yakni :

1) Upah minimum yang dibawah Upah Minimum Kabupaten.

Banyak perusahaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

2) Masih banyak perusahaan yang tidak membuat perjanjian kerja.

3) Jaminan sosial tenaga kerja tidak dijalankan secara menyeluruh dan serius. Komitmen perusahaan untuk melindungi para tenaga kerja wanita belum direalisasikan.

4) Belum terpenuhinya sumber daya pegawai pada bidang-bidang usaha yang spesifik.

5) Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan

husus pada bidang-bidang usaha.

- 6) Kurangnya minat dalam mengupayakan aktivitas yang berdasar pada sumberdaya alam, seperti bertani, berladang, melaut, budidaya.
- 7) Tingginya rasio ketergantungan. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan Kabupaten Karimun merupakan rasio tertinggi dalam kurun waktu empat tahun, sehingga beban yang harus ditanggung oleh usia produktif semakin besar.

3.1.3 Permasalahan terkait bidang Industri Yakni :

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian
Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia
Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.
- 3) Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan-perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya.
- 4) Ketersediaan daya listrik untuk industri

Jumlah ketersediaan daya listrik untuk kebutuhan industri belum memadai. disebabkan belum adanya penambahan daya PLN yang dikhususkan untuk industri, sedangkan pihak swasta (PT. SOMA) baru akan beroperasi pada tahun 2022 dengan total daya diperkirakan mencapai 100 MW.

Tabel 3.1 Peta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial	Banyak perusahaan yang tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Sehingga Kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.	1. Upah yang belum sesuai UMK 2. PHK Sepihak
2	Belum terpenuhinya sumber daya pegawai pada bidang-bidang usaha yang spesifik.	Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha.	Kualitas tenaga kerja relatif masih rendah.
3.	Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian	Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.	Permodalan yang belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3.1 Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2025 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN
EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Karimun. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Karimun dapat di jelaskan sebagai berikut:

Pusat pertumbuhan ekonomi memiliki arti: (1) bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan



produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

Berkeadilan memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

Berlandaskan iman dan taqwa memiliki arti: bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.

3.3.2 Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karimun 2021- 2026.

(1) Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi)

“Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri” memiliki makna: kebijakan pembangunan Kabupaten Karimun untuk masa depan diarahkan menjadi daerah yang mandiri dalam bidang perekonomian baik dibidang industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada, sehingga menghasilkan produksi yang bernilai ekonomis dan mampu bersaing untuk meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan masyarakat.

“Berbasis sumber daya dan kearifan lokal” memiliki makna: aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada wilayah/pulau di Kabupaten Karimun, meliputi sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata, serta mengembangkan dan menggerakkan industri, perdagangan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kondisi geografis Kabupaten Karimun yang berada di jalur perdagangan dunia

(2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah (berkeadilan dalam infrastruktur)

“Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan” memiliki makna: karakteristik wilayahnya terdiri dari pulau-pulau tentu membutuhkan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas wilayah/pulau menjadi lebih mudah dijangkau sehingga dapat mengurangi disparitas harga barang/logistik, meningkatkan produktivitas kawasan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu penyediaan infrastruktur pelayanan publik dan bernilai ekonomi yang tersedia secara merata antarpulau dan antarwilayah yang sesuai dengan kebutuhannya akan terus dilanjutkan. Dengan pemerataan itu, maka dapat menghilangkan kesenjangan pemberian pelayanan publik karena faktor letak geografis.

“Pertumbuhan ekonomi wilayah” memiliki makna: pembangunan infrastruktur yang berkeadilan akan mengintegrasikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan konektivitas menjadi lebih maju. Konektivitas dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan orang dan distribusi barang, jasa dan informasi.



(3) Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)

Sumber daya manusia yang “kuat” memiliki makna : adalah sumber daya manusia yang secara fisik jasmani sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk mewujudkan itu perlu dijamin ketersediaan pelayanan dan sarana prasarana di bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.

“kompetitif” memiliki makna : dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang memiliki daya saing dari segi pengetahuan, keterampilan, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang lebih terbuka. Untuk itu dibutuhkan upaya peningkatan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar kerja.

“berbudaya” memiliki makna : adalah masyarakat yang tidak meninggalkan identitas luhurnya sebagai warga dari kebudayaan setempat, senantiasa menjaga dan mengamalkan kearifan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengekspresikan kekayaan budayanya melalui aktivitas-aktivitas dan benda- benda budaya. Budaya setempat yang dimaksud adalah Budaya Melayu yang menjadi karakter, namun dengan tetap menghargai keberadaan budaya-budaya lain yang hadir, sebagai perwujudan akan *pluralisme* dan *heterogenitas* masyarakat Kabupaten Karimun.

(4) Meningkatkan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup (berkeadilan dalam melestarikan lingkungan hidup)

Bahwa dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan selalu diselaraskan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi- fungsi dari lingkungan hidup dan memastikan bahwa semua jenis

aktivitas ekonomi pada sektor industri, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan perdagangan maupun jasa adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan.

(5) Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)

“birokrasi yang profesional” memiliki makna : 1) terciptanya pemerintahan yang baik dan efektif serta mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh birokrat sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi didalam pelayanan publik dan dapat menyampaikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat serta cepat; 2) penguatan peran birokrasi pemerintahan dalam perwujudan visi pemerintah Kabupaten Karimun adalah melalui pembenahan, perbaikan dan penguatan administrasi dan manajemen kepegawaian; 3) perubahan dan pembenahan tersebut diharapkan mampu membawa perubahan terhadap *mindset* dan *culturset* birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun sehingga menghasilkan aparatur yang berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera yang pada akhirnya membentuk profil birokrasi pemerintah Kabupaten Karimun yang profesional dalam rangka mendukung visi Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa. **“birokrasi yang unggul”** memiliki makna: adalah pengembangan sumber daya aparatur dengan melakukan peningkatan *skill* (keterampilan) yang adaptif dan memiliki kemampuan menguasai teknologi, kemampuan berpikir, beraktualisasi, memiliki kapasitas inovatif dan kreatif dengan melakukan pembenahan dalam sisi birokrasi yang bersifat melayani masyarakat sehingga terwujudnya percepatan transformasi birokrasi melalui pengembangan sistem kinerja pelayanan dan sistem organisasi yang modern serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi secara agresif.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat berkontribusi

terhadap misi ke-tiga dan ke-lima Kabupaten Karimun yaitu:

- 1. Misi Ke Tiga : Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)**
- 2. Misi Kelima : Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)**

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam mewujudkan pencapaian misi tersebut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Visi : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa.			



	Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)	Belum optimalnya perkembangan industri kecil dan Menengah juga masih rendahnya kondisi industri yang memiliki standar produksi layak	Terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor Industri Kecil dan Menengah	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor Industri Kecil dan Menengah
		Belum optimalnya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam penyelesaian masalah ketenakerjaan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 8,36% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 59,76%.	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karimun	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor ketenakerjaan.
		Belum optimalnya pelayanan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2020 menunjukkan bahwa besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tidak terlaksana karena pandemi covid 19.		

	Tujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas	Belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Kabupaten Karimun yang sesuai dengan standar perusahaan/industry	Masih terdapat kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas di beberapa fungsi ketenagakerjaan dan perindustrian	Adanya kebijakan dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati periode 2021-2026 di sektor ketenagakerjaan.
	Sasaran Menurunkan Angka Kemiskinan	Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja	Lapangan Pekerjaan yang tidak tersedia	Adanya beberapa perusahaan yang akan berinvestasi diantaranya PT. SOMA baru akan beroperasi pada tahun 2022.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan

Pada dasarnya arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan wilayah, serta pembangunan bidang aparatur negara. Arah kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan ditujukan dalam rangka mewujudkan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahteran, Adil dan Berkesinambungan”.

Adapun arah kebijakan dan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas.
2. Penempatan dan Pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan.

3. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan.
4. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan pelayanan internal.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu:

1. pengelolaan sumber daya ekonomi; dan
2. peningkatan nilai tambah ekonomi.

Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup beberapa sektor, khususnya sektor industri pengolahan nonmigas. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Sektor industri pengolahan nonmigas memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi sektor unggulan nasional.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industry
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industry
3. Kebijakan pemberdayaan industry
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industry
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal
6. Kebijakan reformasi birokrasi.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri

1. Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja
2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja
3. Mengembangkan pelatihan berdasarkan pada kebutuhan sektor, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan status pekerjaan. (Membangun link and match antara program pendidikan dan program pelatihan dengan dunia kerja)
4. Memperluas skala pelatihan keterampilan tenaga kerja melalui mengembangkan Balai Latihan Kerja atau kerjasama pelatihan dengan LPK yang mendukung Revolusi industri 4.0
5. Meningkatkan pola pelayanan untuk memperoleh informasi pelatihan, sertifikasi, pemagangan dan penempatan tenaga kerja bagi calon tenaga kerja (angkatan kerja).
6. Peningkatan peran daerah dalam memfasilitasi penempatan dan perlindungan pekerja.
7. Perluasan Kesempatan Kerja yang berorientasi pada Usaha Mandiri.
8. Perluasan Kesempatan Kerja dengan meningkatkan penciptaan wirausaha baru, meliputi Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional, Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik dalam program pendampingan wirausaha, Tenaga Kerja Mandiri, Pendampingan Wirausaha Baru, terapan Teknologi Tepat Guna.
9. Padat Karya Produktif.

10. Penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna melalui pelaksanaan padat karya infrastruktur, pelaksanaan padat karya ekonomi produktif.
 11. Penempatan Tenaga Kerja Khusus, seperti untuk penyandang cacat, dll.
 12. Menggandeng perusahaan dan Diknas dalam rangka menggiatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan bagi lulusan baru SMA atau PT, untuk menerima mereka sebagai tenaga kerja magang.
 13. Peningkatan kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dalam penanganan perselisihan antara pekerja dan Pengusaha baik dari kuantitas maupun kualitas (Mediator)
 14. Mengoptimalkan Perselisihan Hubungan Industrial diselesaikan melalui perjanjian bersama.
 15. Mengoptimalkan pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja
 16. Mengoptimalkan Pembinaan kepada perusahaan terkait kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan bagi buruh/pekerja.
- D. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri.
- Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri
1. Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
 2. Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat.
 3. Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Berkarakter.
 4. Tatakelola Pemerintahan Yang bersih.
 5. Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya dan Harmoni Masyarakat.
 6. Percepatan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau.
 7. Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Pertambangan dan Lingkungan

Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1		Ketenagakerjaan		
	Memperluas Kesempatan Kerja dan peluang usaha	Belum memiliki sistem informasi ketenagakerjaan yang baik dan handal serta mudah diakses oleh masyarakat/ pencari kerja.	Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karimun	Letak Kabupaten Karimun yang strategis yang bersebelahan dengan negara singapura dan Malaysia
	Arah Kebijakan : Meningkatkan kapasitas dan keterampilan Angkatan kerja	Belum adanya kepastian untuk mendirikan workshop/BLK	Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerja an	Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
2		Perindustrian		
	Meningkatkan ketahanan ekonomi	Belum optimalnya perkembangan industri kecil dan Menengah	Minimnya permodalan untuk usaha IKM	Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki sumber daya alam
	Arah Kebijakan : Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.	Masih rendahnya kondisi IKM yang memiliki standar produksi layak	Masih terbatasnya alokasi pagu anggaran untuk sektor ketenagakerja an	Kebijakan nasional dan provinsi yang inovatif tentang pembangunan sektor ketenagakerjaan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja dan perindustrian. Sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Karimun. Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan. Begitu juga dengan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian.

Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW	Tidak terkait		
	Program Indikatif			
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis	Tidak terkait		
	Skenario dan Rekomendasi			

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah melakukan revaluasi kembali terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan dan sasaran jangka menengah, maka ada beberapa isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 diantaranya adalah:

1. Sekretariat

- a. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi, Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu ditingkatkan.
- b. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi.

2. Bidang Hubungan Industrial, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

- a. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan pekerja dengan perusahaan.
- b. Masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan para tenaga kerja pada jaminan sosial tenaga kerja.
- c. Masih Tingginya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- d. Kesenjangan antar pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.
- e. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan ketrampilan.
- g. Masih tingginya angka pengangguran disebabkan Jumlah Angkatan kerja lebih banyak dari pada kesempatan/pekerjaan dan pengurangan tenaga kerja pada beberapa perusahaan sehingga berdampak pada tingkat pengangguran.
- h. Kurangnya kesadaran masyarakat dan peluang untuk berwirausaha/menciptakan lapangan kerja.



3. Bidang Industri

- a. Rendahnya status IKM yang berijin, antara lain IKM memiliki Izin usaha industri kecil melalui P-IRT.
- b. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil.
- c. Rendahnya kondisi industri yang memiliki standar produksi layak.
- d. Belum adanya Regulasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIKA).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Karimun maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berkontribusi dalam Pencapaian visi dan misi Ke-Tiga dan Ke-Lima dalam RPJMD Kabupaten Karimun yaitu :

Misi Ke-Tiga : *Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia).*

Misi Ke-Lima : *Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)*

Untuk Mencapai itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian **sasaran** yang ada dalam **RPJMD** yang merupakan **Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun**.

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun . secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Kuat, Kompetiti dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia).		
No	Tujuan	Indikator Tujuan
A.	Ketenagakerjaan	
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja didaerah	Tingkat Pengangguran Terbuka
B.	Perindustrian	



2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita
----	------------------------------------	----------------

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Unggul (Bekeadilan Dalam Pelayanan Publik)		
No	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik

b. Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
A.	Ketenagakerjaan	
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2) Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja
B.	Perindustrian	
2.	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun beserta indikator kinerjanya disajikan



dalam tabel 4.1 berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Perindustrian											
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		PDRB Perkapita	Jt (RP)	56,78	59,68	62,74	65,94	69,32	72,86	76,59	76,59
		Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,65	0,65	0,66	,066	,066	0,67	0,67	0,67
B	Ketenagakerjaan											
2.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,36	8,20	8	7,60	7,10	6,60	6	6
		Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	59,76	60,17	61,21	62,45	63,71	64,17	65,27	65,27
			Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Persen	91,37	91,37	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65	91,65
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan		Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75	2,90	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
		Meningaktnya Akuntabilitas Kinerja Disnkarin	Nilai Akip	Nilai	72,16	72,72	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

BAB V**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi akan melahirkan program, sedangkan kebijakan akan melahirkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 5.1 berikut:



Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”				
Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia).				
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
PERINDUSTRIAN				
1.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat	Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Dan Menengah	Pelaksanaan Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendataan, Pembinaan Dan Pelatihan
KETENAGAKERJAAN				
1.	Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	1. Pelayanan bagi pencari kerja 2. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Serta Peningkatan Kesempatan Kerja 2. Meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, serta meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja di perusahaan
Misi 5 : Mewujudkan birokrasi yang profesional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Meningkatkan Sistem Pelayanan Yang Lebih Baik	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kontribusi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Terhadap Program Strategis RPJMD Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel 6.1 berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode						Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (2026)	
													2022		2023		2024		2025		2026			
											2020	2021	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik								Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,75 Nilai	2,9 Nilai	3,01 Nilai		3,5 Nilai		3,51 Nilai		3,55 Nilai		4 Nilai		4 Nilai		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin							Nilai Akip	Nilai	72,16 Nilai	72,72 Nilai	73,00 Nilai	4.522.900.000	73,00 Nilai	4.490.950.000	73,00 Nilai	4.529.705.000	73,00 Nilai	4.599.810.000	73,00 Nilai	4.932.955.000	73,00 Nilai	23.076.320.000	
		2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	75 Nilai	75 Nilai	80 Nilai	4.522.900.000	80 Nilai	4.490.950.000	80 Nilai	4.529.705.000	80 Nilai	4.599.810.000	80 Nilai	4.932.955.000	80 Nilai	23.076.320.000	
		2	7	1	2 / 0 1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok / Lap	9 Dokumen / 2 Laporan	4 Dokumen / 2 Laporan	2 Dokumen / 5 Laporan	130.000.000	2 Dokumen / 5 Laporan	100.000.000	2 Dokumen / 5 Laporan	131.500.000	2 Dokumen / 5 Laporan	136.500.000	2 Dokumen / 5 Laporan	131.500.000	10 Dokumen / 25 Laporan	629.500.000	
		2	7	1	2 / 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	51.500.000	2 Dokumen	41.500.000	2 Dokumen	52.000.000	2 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	52.000.000	11 Dokumen	252.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2 , 0 1	6	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap		5 Lapor an	3 Laporan	3 Lapor an	51.500.0 00	3 Lapor an	31.500.000	3 Lapora n	51.500.000	3 Lapora n	53.500.000	3 Lapora n	51.500.000	15 Laporan	239.500.000
		2	7	1	2 , 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	-	-	2 Lapor an	2 Lapor an	27.000.0 00	2 Lapor an	27.000.000	2 Lapora n	28.000.000	2 Lapora n	28.000.000	2 Lapora n	28.000.000	10 Laporan	138.000.000
		2	7	1	2 , 0 2		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	3.547.00 0.000	3 Dok	3.568.000 .000	3 Dok	3.570.000 .000	3 Dok	3.570.000 .000	3 Dok	3.570.000. 000	13 Dokume n	17.825.000. 000	
		2	7	1	2 , 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	300 Oran g / Bulan	300 Orang / Bulan	300 Orang / Bulan	3.507.00 0.000	312 Orang / Bulan	3.443.000. 000	324 Orang / Bulan	3.445.000. 000	336 Orang / Bulan	3.445.000. 000	336 Orang / Bulan	3.445.000.0 00	1608 Orang/B ulan	17.285.000.0 00	
		2	7	1	2 , 0 2	2	Penyediaan Administراس i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administراس i Pelaksanaa n Tugas Asn	Dokum en	1 Doku men	1 Dokume n	1 Doku men	20.000.0 00	1 Doku men	30.000.000	1 Dokum en	30.000.000	1 Dokum en	30.000.000	1 Dokum en	30.000.000	5 Dokume n	140.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2 , 0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
		2	7	1	2 , 0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	80.000.000
		2	7	1	2 , 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	60.000.000
		5	1	1	2 , 0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	0	0	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	10 Laporan	120.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		5	1	1	2 0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	60.000.000
		5	1	1	2 0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	10 Laporan	75.000.000
		5	1	1	2 0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	1 Dokumen	5.000.000	0	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000
		5	1	1	2 0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	10.000.000	10 Laporan	55.000.000
		2	7	1	2 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	0	0	3 Laporan	60.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	45.000.000	3 Laporan	70.000.000	2 Laporan	22.500.000	12 Laporan	262.500.000
		2	7	1	2 0 5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0		-	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	5.000.000	8 Unit	20.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	0	1 Paket	30.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	5.000.000	5 Paket	85.000.000
		2	7	1	2	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	0	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	2.500.000	5 Dokumen	57.500.000
		2	7	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	20.000.000
		2	7	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	3 Orang	15.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	20.000.000	3 Orang	5.000.000	15 Orang	80.000.000
		2	7	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	0	8	8	118.050.000	8	132.150.000	8	132.400.000	8	132.500.000	8	132.500.000	40 Laporan	647.600.000
		2	7	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.600.000	1 Paket	2.600.000	1 Paket	2.600.000	5 Paket	12.600.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2 , 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	13.000.000	1 Paket	14.000.000	1 Paket	14.000.000	1 Paket	14.000.000	1 Paket	14.000.000	5 Paket	69.000.000
		2	7	1	2 , 0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	5 Paket	34.000.000
		2	7	1	2 , 0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.300.000	1 Paket	7.500.000	1 Paket	7.600.000	1 Paket	7.600.000	1 Paket	7.600.000	5 Paket	37.600.000
		2	7	1	2 , 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	7.650.000	1 Paket	7.750.000	1 Paket	7.800.000	1 Paket	7.800.000	1 Paket	7.800.000	5 Paket	38.800.000
		2	7	1	2 , 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.300.000	1 Dokumen	15.400.000	1 Dokumen	15.400.000	1 Dokumen	15.500.000	1 Dokumen	15.500.000	5 Dokumen	77.100.000
		2	7	1	2 , 0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	42.500.000	3 Laporan	44.000.000	3 Laporan	44.000.000	3 Laporan	44.000.000	3 Laporan	44.000.000	15 Laporan	218.500.000
		2	7	1	2 , 0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	34.000.000	5 Dokumen	160.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	0	0	2 Laporan	55.000.000	8 Laporan	20.000.000	8 Laporan	35.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	306.700.000	28 Laporan	466.700.000
		2	7	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	206.700.000	1 Unit	206.700.000
		2	7	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	3 Unit	10.000.000
		2	7	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	5 Unit	25.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	6.000.000	2 Unit	9.000.000	4 Unit	20.000.000	15 Unit	63.000.000
		2	7	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	4 Unit	30.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	5.000.000	3 Unit	15.000.000	4 Unit	30.000.000	15 Unit	83.000.000
		2	7	1	2	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	0	-	2 Unit	6.000.000
		2	7	1	2	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	0	-	2 Unit	6.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2 , 0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	4.000.000	0	-	0	-	2 Unit	6.000.000
		2	7	1	2 , 0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	1 Unit	2.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	30.000.000	4 Unit	52.000.000
		2	7	1	2 , 0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	-	1 Unit	3.000.000	1 Unit	4.000.000	1 Unit	7.000.000	1 Unit	20.000.000	4 Unit	34.000.000
		2	7	1	2 , 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	540.750.000	4 Laporan	543.000.000	4 Laporan	543.000.000	4 Laporan	568.000.000	4 Laporan	588.000.000	20 Laporan	2.782.750.000
		2	7	1	2 , 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.300.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	2 Laporan	1.500.000	10 Laporan	7.300.000
		2	7	1	2 , 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	18.000.000	3 Laporan	18.500.000	3 Laporan	18.500.000	3 Laporan	18.500.000	3 Laporan	18.500.000	15 Laporan	92.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2 , 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Lapora n	2 Lapor an	2 Laporan	2 Lapor an	10.000.0 00	2 Lapor an	11.000.000	2 Lapora n	11.000.000	2 Lapora n	11.000.000	2 Lapora n	11.000.000	10 Laporan	54.000.000
		2	7	1	2 , 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	3 Lapor an	3 Laporan	3 Lapor an	511.450. 000	3 Lapor an	512.000.00 0	3 Lapora n	512.000.00 0	3 Lapora n	537.000.00 0	3 Lapora n	557.000.000	15 Laporan	2.629.450.00 0
		2	7	1	2 , 0 9		Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah Laporan Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Lapor an	2 Lapo ran	2 Laporan	3 Lapor an	57.100.0 00	8 Lapor an	47.800.00 0	8 Lapora n	57.805.00 0	8 Lapora n	57.810.00 0	8 Lapora n	166.755.00 0	35 Laporan	387.270.000
		2	7	1	2 , 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	40.100.0 00	2 Unit	13.800.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	15.005.000	2 Unit	56.755.000	10 Unit	140.660.000
		2	7	1	2 , 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	12.000.0 00	2 Unit	5.000.000	2 Unit	8.305.000	2 Unit	8.305.000	2 Unit	30.000.000	10 Unit	63.610.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	6.000.000	5 Unit	6.000.000	5 Unit	20.000.000	25 Unit	42.000.000
		2	7	1	2	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	1 Unit	4.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	10.000.000	4 Unit	24.000.000
		2	7	1	2	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	10.000.000	4 Unit	27.000.000
		2	7	1	2	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	20.000.000	4 Unit	37.000.000
		2	7	1	2	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	10.000.000	4 Unit	27.000.000
		2	7	1	2	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	1 Unit	5.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	10.000.000	4 Unit	26.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Mendoron g perluasan dan kesempara n kerja bagi tenaga kerja didaerah								Tingkat Penganggr uran Terbuka (TPT)	Persen	8,36 %	8,20%	8%	8.177.10 0.000	7,60%	8.869.550 .000	7,10%	8.901.202 .000	6,60%	8.860.190 .000	6%	8.542.045. 000	6%	43.350.087. 000
	Meningkat nya pertumbu han tenaga kerja lokal yang kompetitif							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	59,76 %	60,17%	61,21 %		62,45 %		63,71 %		64,17 %		65,27 %		65,27%	
									Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja	Persen	91,37	91,37	91,45	7.077.10 0.000	91,50	7.229.550 .000	91,55	7.026.202 .000	91,60	7.100.190 .000	91,65	6.627.045. 000	91,70
		2	7	2			PROGRAM PERENCANA AAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempara n Kerja	Persen	91,63 %	92,25%	93,31 %	300.000. 000	94,55 %	-	95,41 %	-	96,33 %	-	97,56 %	235.000.00 0	97,56%	535.000.000
		2	7	2	2 , 0 1		Penyusuna n Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kab Karimun yang disusun	Doku men	0	0	2 Doku men	300.000. 000	0	-	0	-	0	-	2 Dokum en	235.000.00 0	4	535.000.000
		2	7	2	2 , 0 1	1	Penyusuna n Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokum en	0	0	1 Doku men	150.000. 000	0	-	0	-	0	-	1 Dokum en	125.000.000	2	275.000.000
		2	7	2	2 , 0 1	2	Penyusuna n Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusa haan	0	0	20 Perus ahaan	150.000. 000	0	-	0	-	0	-	20 Perusa haan	110.000.000	40	260.000.000

		2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen														
		2	7	3	2 0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	Na (Pandemi Covid 19)	3,60%	30%	4.762.100.000	30%	5.404.550.000	30%	4.951.202.000	30%	5.175.190.000	30%	4.387.045.000	30%	24.680.087.000
		2	7	3	2 0 1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	Na (Pandemi Covid 19)	15 Orang	550 Orang	4.562.100.000	620 Orang	5.219.550.000	560 Orang	4.766.202.000	570 Orang	5.000.190.000	510 Orang	4.182.045.000	2810 Orang	23.730.087.000
		2	7	3	2 0 1	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga		0	4 Lembaga	100.000.000	4 Lembaga	85.000.000	4 Lembaga	85.000.000	75.000.000	4 Lembaga	85.000.000	20 Lembaga	430.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	7	3	2	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	0	0	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	120.000.000	25 Unit	520.000.000
2	7	3	2	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Lembaga	0	0	1 Lembaga	135.000.000	1 Lembaga	130.000.000	1 Lembaga	135.000.000	1 Lembaga	135.000.000	2 Lembaga	135.000.000	2 Lembaga	670.000.000
2	7	3	2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	0	1 Lembaga	135.000.000	1 Lembaga	130.000.000	1 Lembaga	135.000.000	1 Lembaga	135.000.000	2 Lembaga	135.000.000	6 Lembaga	670.000.000
2	7	3	2	4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Laporan Produktivitas perusahaan kecil	Laporan	Na	Na	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	5 Laporan	415.000.000
2	7	3	2	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	0	0	10 Perusahaan	100.000.000	10 Perusahaan	75.000.000	10 Perusahaan	80.000.000	10 Perusahaan	80.000.000	10 Perusahaan	80.000.000	50 Perusahaan	415.000.000
2	7	3	2	5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	360.000.000
2	7	3	2	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	360.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	0	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen	44,66 %	91,22%	45,15 %		46,50 %		46,75 %		47,25 %		47,25 %		47,25%	
			7					Retribusi Izin Mempeker- jakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rupiah	1.600 .000. 000	984.113. 300	2.000. 000.0 00	880.000. 000	2.100. 000.0 00	940.000.0 00	2.100.0 00.000	1.035.000 .000	2.200. 000.00 0	960.000.0 00	2.200.0 00.000	890.000.00 0	10.600.0 00.000	4.705.000.0 00
		2	0	0	2		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	Doku- men	0	0	1 Doku- men	450.000. 000	1 Doku- men	470.000.0 00	1 Doku- men	565.000.0 00	1 Doku- men	490.000.0 00	1 Dokum- en	420.000.00 0	5 Dokume- n	2.395.000.0 00
		2	0	0	2	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatk- an Pelatihan Melalui Bimtek dan lain lain untuk Peningkata- n Kompetensi	Orang	0	0	2 Orang	75.000.0 00	2 Orang	50.000.000	2 Orang	75.000.000	2 Orang	25.000.000	2 Orang	25.000.000	10 Orang	250.000.000
		2	0	0	2	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatka- n Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	0	0	250 Orang	75.000.0 00	250 Orang	100.000.00 0	250 Orang	100.000.00 0	250 Orang	75.000.000	250 Orang	75.000.000	1250 Orang	425.000.000
		2	0	0	2	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatk- an Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	0	0	20 Orang	85.000.0 00	20 Orang	95.000.000	20 Orang	105.000.00 0	20 Orang	105.000.00 0	20 Orang	110.000.000	100 Orang	500.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	0	0	2	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	0	0	2 Orang	65.000.000	2 Orang	75.000.000	2 Orang	80.000.000	2 Orang	80.000.000	0	-	8 Orang	300.000.000
		2	0	0	2	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	0	20 Orang	150.000.000	20 Orang	150.000.000	20 Orang	205.000.000	20 ORang	205.000.000	20 Orang	210.000.000	100 Orang	920.000.000
		2	7	4	2	0	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	Perusahaan	7 Perusahaan	9 Perusahaan	5 Perusahaan	330.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	5 Perusahaan	360.000.000	35 Perusahaan	1.770.000.000
		2	7	4	2	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	590.000.000
		2	7	4	2	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	0	0	250 Orang	110.000.000	250 Orang	120.000.000	250 Orang	120.000.000	250 Orang	120.000.000	250 Orang	120.000.000	1250 Orang	590.000.000
		2	0	0	2	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	0	0	100 Orang	110.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	120.000.000	100 Orang	120.000.000	1250 Orang	590.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	4	2 0 5		Penerbitan Perpanjan gan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah TKA yang Mendapat kan Penerbitan Perpanjan gan IMTA	Orang		111 Oran g	111 Orang	111 Oran g	100.000. 000	111 Orang	110.000.0 00	111 Orang	110.000.0 00	111 Orang	110.000.0 00	111 Orang	110.000.00 0	555 Orang	540.000.000
		2	7	4	2 0 5	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjang an IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisa si Perpanajan gan IMTA	Lapora n		Lapor an	0	1 Lapor an	100.000. 000	1 Lapor an	110.000.00 0	1 Lapora n	110.000.00 0	1 Lapora n	110.000.00 0	1 Lapora n	110.000.000	5 Laporan	540.000.000
		2	7	5			PROGRAM HUBUNGA N INDUSTRI AL	Penyelesai an kasus yang difasilitasi	Kasus		5 Kasu s	3 Kasus	5 Kasus	800.000. 000	5 Kasus	620.000.0 00	6 Kasus	760.000.0 00	6 Kasus	685.000.0 00	6 Kasus	830.000.00 0	28 Kasus	3.695.000.0 00
		2	7	5	2 0 1		Pengesaha n Peraturan Perusahaa n dan Pendaftara n Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaa n yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perusahaa n yang telah memiliki PP	Jumla h Perusa haan	18 Perus ahaa n	20 Perusah aan	22 Perus ahaan	260.000. 000	24 Perus ahaan	26 Perusa haan	250.000.0 00	28 Perusa haan	265.000.0 00	30 Perusa haan	265.000.00 0	30 Perusah aan	1.275.000.0 00		
							Jumlah perusahaaa n yang telah memiliki PKB	Jumla h Perusa haan		4 Perus ahaa n	4 Perusah aan	4 Perus ahaan		4 Perus ahaan			4 Perusa haan		4 Perusa haan		4 Perusa haan			



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	5	2 , 0 1	1	Pengesaha n Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanak an Pengesaha n Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusa haan		31 Perus ahaa n	31 Perusaha an	31 Perus ahaan	60.000.0 00	31 Perusa haan	50.000.000	33 Perusa haan	55.000.000	35 Perusa haan	60.000.000	38 Perusa haan	60.000.000	38 Perusaha an	285.000.000
		2	7	5	2 , 0 1	2	Pendaftara n Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusa haan		4 Perus ahaa n	4 Perusaha an	4 Perus ahaan	60.000.0 00	4 Perusa haan	50.000.000	4 Perusa haan	55.000.000	4 Perusa haan	60.000.000	4 Perusa haan	60.000.000	4 Perusaha an	285.000.000
		2	7	5	2 , 0 1	3	Penyelengg araan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupaha n	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupaha n	Lapora n		1 Lapor an	1 Laporan	1 Lapor an	140.000. 000	1 Lapor an	135.000.00 0	1 Lapora n	140.000.00 0	1 Lapora n	145.000.00 0	1 Lapora n	145.000.000	5 Laporan	705.000.000
		2	7	5	2 , 0 2		Pencegaha n dan Penyelesai an Perselisih an Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaa n di Daerah	Jumlah Laporan Pencegaha n dan Penyelesai an Perselisih an Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaa n	Lapor an		3 Lapo ran	4 Laporan	4 Lapao ran	540.000. 000	3 Lapor an	385.000.0 00	4 Lapora n	510.000.0 00	3 Lapora n	420.000.0 00	4 Lapora n	565.000.00 0	18 Laporan	2.420.000.0 00



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

						Kabupaten /Kota																		
		2	7	5	2 , 0 2	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	85.000.000	7 Perkara	65.000.000	7 Perkara	90.000.000	7 Perkara	70.000.000	7 Perkara	110.000.000	35 Perkara	420.000.000
		2	7	5	2 , 0 2	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara		7 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	100.000.000	7 Perkara	65.000.000	7 Perkara	90.000.000	7 Perkara	70.000.000	7 Perkara	100.000.000	35 Perkara	425.000.000
		2	7	5	2 , 0 2	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi	0	2 Asosiasi / 8 SP-SB	2 Asosiasi / 8 SP-SB	100.000.000	2 Asosiasi / 8 SP-SB	65.000.000	2 Asosiasi / 8 SP-SB	90.000.000	2 Asosiasi / 8 SP-SB	70.000.000	2 Asosiasi / 8 SP-SB	100.000.000	2 Asosiasi / 8 SP-SB	425.000.000	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		2	7	5	2 0 2	4	Pelaksanaan n Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lemba ga	1 Lemb aga	1 Lembaga	1 Lemb aga	135.000. 000	1 Lemba ga	130.000.00 0	1 Lemba ga	130.000.00 0	1 Lemba ga	130.000.00 0	1 Lemba ga	135.000.000	1 Lembaga	660.000.000
		2	7	5	2 0 2	5	Pengemb an Pelaksanaa n Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahtera an Pekerja	Terlaksanan ya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahtera an Pekerja	Orang	0	0	50 Orang	120.000. 000	50 Orang	60.000.000	50 Orang	110.000.00 0	50 Orang	80.000.000	150 Orang	120.000.000	350 Orang	490.000.000
Meningkat nya Pendapata n Masyaraka t								PDRB Perkapita	Rupia h	56,78 Juta (Rp)	59,68 Juta (Rp)	62,74 Juta (Rp)		65,94 Juta (Rp)		69,32 Juta (Rp)		72,86 Juta (Rp)		76,59 Juta (Rp)		76,59 Juta (Rp)	
	Meningkat nya Kewirause haan Masyaraka t							Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	Persen tase	0,65 %	0,65%	0,66%	1.100.00 0.000	0,66%	1.640.000 .000	0,66%	1.875.000 .000	0,67%	1.760.000 .000	0,68%	1.915.000. 000	0,68%	8.290.000.0 00
		3	3 1	2			PROGRAM PERENCANA AN DAN PEMBANG UNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen tase	48,15 %	59,65%	69,65 %	550.000. 000	77,15 %	1.270.000 .000	82,15 %	1.495.000 .000	85,40 %	1.370.000 .000	88,90 %	1.525.000. 000	88,90%	6.210.000.0 00
		3	3 1	2	2 0 1		Penyusuna n dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri	Doku men	0	2 Dokume n	6 Doku men	550.000. 000	6 Doku men	1.270.000 .000	6 Doku men	1.495.000 .000	6 Doku men	1.370.000 .000	6 Dokum en	1.525.000. 000	30 Dokume n	6.210.000.0 00



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3 1	3 1	2	2 0 1	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	270.000.000
		3 1	3 1	2	2 0 1	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,0	1 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	205.000.000
		3 1	3 1	2	2 0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,0	1 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	205.000.000
		3 1	3 1	2	2 0 1	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000,0	1 Dokumen	55.000.000	5 Dokumen	205.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	31	2	201	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	975.000.000	1 Dokumen	1.215.000.000	1 Dokumen	1.075.000.000	1 Dokumen	1.230.000.000	5 Dokumen	5.045.000.000
		3	31	2	201	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0			-	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000	5 Dokumen	280.000.000
		3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase	12%	16,6%	26,6%	200.000.000	44%	100.000.000	52%	120.000.000	66%	120.000.000	76%	120.000.000	76%	660.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	3 1	3	2 . 0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenang an Kabupaten /Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Doku men	0	0	1 Doku men	200.000.000	1 Doku men	100.000.000	1 Doku men	120.000.000	1 Doku men	120.000.000	1 Dokum en	120.000.000	5 Dokume n	660.000.000
		3	3 1	3	2 . 0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga n Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi,	Dokum en	0	0	1 Doku men	100.000.000	1 Doku men	50.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	5 Dokume n	330.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

							Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS															
	3	3 1	3	2 . 0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasa n Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Dokum en	0	0	1 Doku men	100.000. 000	1 Doku men	50.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	1 Dokum en	60.000.000	5 Dokume n	330.000.000
	3	3 1	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Doku men	1 Doku men	1 Dokume n	1 Doku men	350.000. 000	1 Doku men	270.000.0 00	1 Doku men	260.000.0 00	1 Doku men	270.000.0 00	1 Dokum en	270.000.00 0	5 Dokume n	1.420.000.0 00



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	3	4	2		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	270.000.000	3 Dokumen	260.000.000	3 Dokumen	270.000.000	3 Dokumen	270.000.000	15 Dokumen	1.420.000.000
		3	3	4	2	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	300.000.000
		3	3	4	2	2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	0	0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	5 Dokumen	340.000.000



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

		3	3 1	4	2 . 0 1	3	Pemantau n dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampai an Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantau n dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampai an Data ke SIINas	Dokum en	0	0	1 Doku men	150.000. 000	1 Doku men	160.000.00 0	1 Dokum en	150.000.00 0	1 Dokum en	160.000.00 0	1 Dokum en	160.000.000	5 Dokume n	780.000.000
TOTAL													12.700.0 00.000		13.360.50 0.000		13.430.90 7.000		13.460.00 0.000		13.475.000 .000		66.426.407. 000

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berikut ini adalah rumusan penjabaran indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun di tampilkan dalam tabel sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Perindustrian											
1.	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk [dibagi] jumlah IKM [dikali] 100 persen	Persen	0,65	0,65	0,66	,066	,066	0,67	0,67	0,67
Ketenagakerjaan											
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah Penduduk Bekerja [dibagi] jumlah angkatan kerja [dikali] 100 persen	Persen	59,76	60,17	61,21	62,45	63,71	64,17	65,27	65,27
3.	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Lokal [dibagi] Jumlah Tenaga Kerja [dikali] 100 persen	Persen	91,37	91,37	91,45	91,50	91,55	91,60	91,65	91,65
4.	Nilai Akip	Nilai	Nilai	72,16	72,72	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

No	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
A	TENAGA KERJA										
1	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja pada perusahaan [dibagi] jumlah tenaga kerja PMDN dan PMA [dikali] 100 persen	Persen	91,63	92,25	93,31	94,55	95,41	96,33	97,56	97,56



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi [dibagi] jumlah tenaga kerja keseluruhan [dikali] 100 persen	Persen	55,79	55,79	56,45	56,45	57,23	57,23	58,00	58,00
3	Penyelesaian Kasus yang Difasilitasi	Memfasilitasikan penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama oleh mediator Hubungan industrial	Kasus	5	5	5	5	6	6	6	38
4	Retribusi IMTA	Retribusi Perpanjangan IMTA	M (Rp)	1,6	2	2	2,1	2,1	2,2	2,2	14,2
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Jumlah pencaker/pencari kerja yang ditempatkan [dibagi] jumlah pencaker yang mendaftar [dikali] 100 persen	Persen	44,66	44,66	45,15	46,50	46,15	47,25	47,25	47,25
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai	N/A	80	80	80	80	80	80	80
II	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
E	PERINDUSTRIAN										
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n [dibagi] jumlah kelompok pengrajin [dikali] 100 persen	Persen	48,15	59,65	69,65	77,15	82,15	85,40	88,90	88,90
2	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan [dibagi] jumlah izin yang dikeluarkan [dikali] 100 persen	Persen	12	16,6	26,6	44	52	66	76	76
3	Dokumen Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5

BAB VIII**PENUTUP**

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dalam jangka 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan isu strategis terkini. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada dokumen sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2021. Mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2026 dan tugas dan fungsi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berperan dalam mendukung dan mensukseskan capaian misi Ke-Satu, Ke-Tiga dan Ke-Lima Kabupaten Karimun yaitu:

Misi Ke-Tiga : *Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)*

Misi Ke-Lima : *Mewujudkan birokrasi yang professional dan unggul (berkeadilan dalam pelayanan publik)*

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh insan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan, dan merupakan hasil kumulatif dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang terkait dengan Tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.



- 2) Untuk membuat Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi. Dan membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
- 3) Mensosialisasikan Renstra ini kepada seluruh Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan mitra serta stakeholder Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



LAMPIRAN

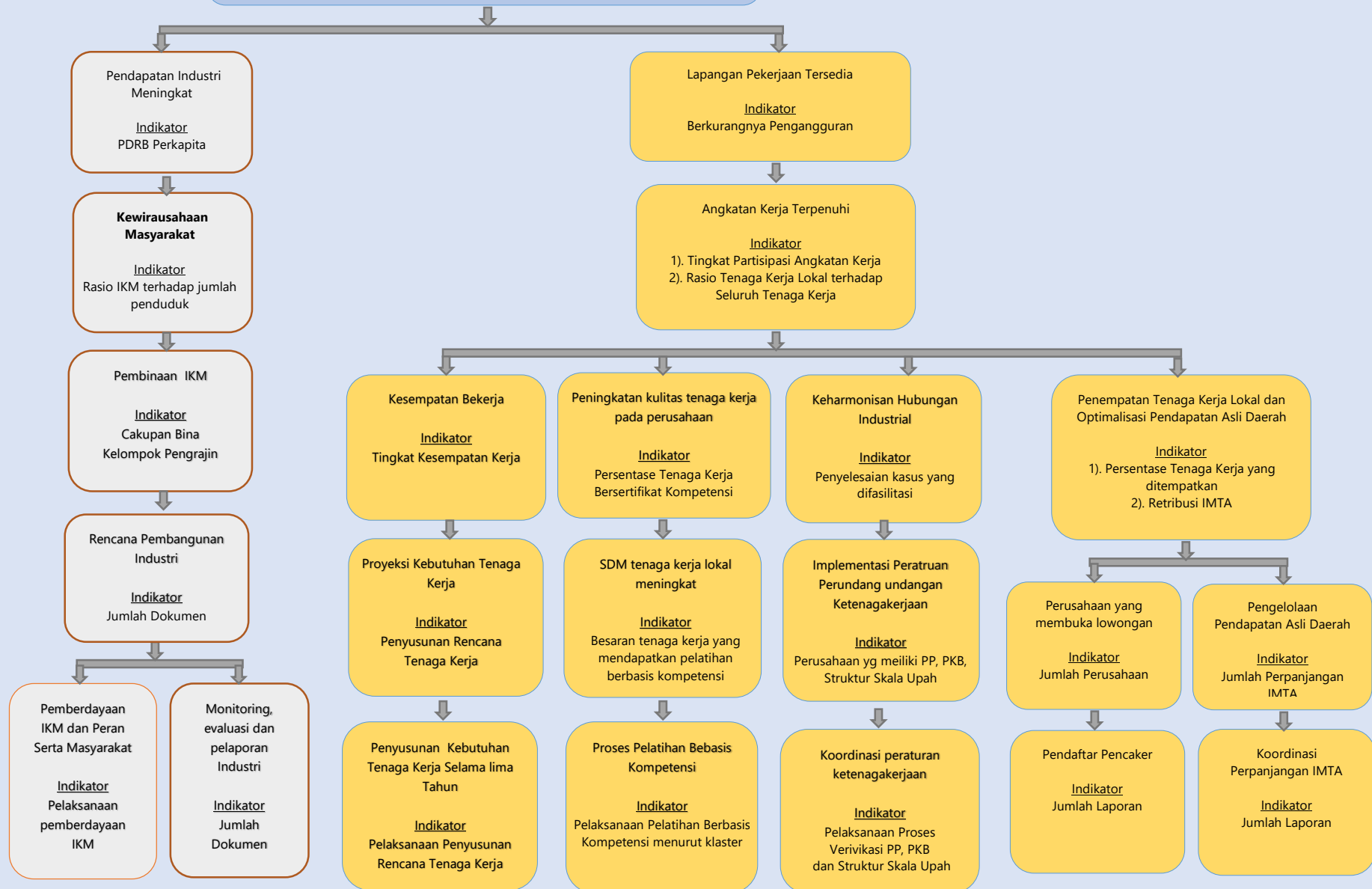
POHON KINERJA & CASCADING

Misi 3 & Misi 5

POHON KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2021-2026
KABUPATEN KARIMUN

MISI 3

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya
Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya
Manusia)



CASCADING
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2021 - 2026
KABUPATEN KARIMUN

V I S I

TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

M I S I 3

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa (Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia)

TUJUAN I
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Indikator
PDRB Perkapita

SASARAN:
Meningkatnya Kewirausahaan Masyarakat

Indikator
Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk

TUJUAN II
Mendorong perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah

Indikator
Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN:
Meningkatnya pertumbuhan tenaga kerja lokal yang kompetitif

Indikator
1). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2). Rasio tenaga kerja lokal terhadap seluruh tenaga kerja

SASARAN:
Meningkatnya Pembiayaan dan Perumbuhan IKM

Indikator
1). Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
2). Persentase Pertambahan IKM

SASARAN:
Terwujudnya Rencana Pemangungan Industri

Indikator
Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA

SASARAN:
Terwujudnya Pengendalian IUI

Indikator
hasil pemantauan dg jlh izin Usaha IKM yang dikeluarkan oleh instansi terkait

SASARAN:
Terwujudnya a Pengelolaan Informasi Nasional

Indikator
Jumlah Industri di Aplikasi SINAS

SASARAN:
Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator
Tingkat Kesempatan Kerja

SASARAN:
Meningkatnya Kualitas tenaga kerja lokal

Indikator
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

SASARAN:
Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis

Indikator
1). Penyelesaian kasus yang difasilitasi

SASARAN:
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja Lokal serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Indikator
1). Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan
2). Retribusi IMTA

SASARAN:
Meningkatkan pemberdayaan bagi IKM dan masyarakat

Indikator
Persentase IKM dan masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan

SASARAN:
Mewujudkan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

Indikator
Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana

SASARAN:
Mewujudkan Penerbitan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI

Indikator
Jumlah Hasil Penerbitan IUI, IPU, IUKI dan IPKI

SASARAN:
Mewujudkan Informasi Industri

Indikator
Persentase Informasi untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI

SASARAN:
Tersedianya Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Makro

Indikator
Jumlah Dokumen RTK Makro yg disusun

SASARAN:
Tersedianya Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Mikro

Indikator
Jumlah Dokumen RTK Mikro yg disusun

SASARAN:
Meningkatnya tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi

Indikator
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

SASARAN:
Meningkatkan Produktivitas pada perusahaan

Indikator
Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas

SASARAN:
Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis

Indikator
1). Persentase Perusahaan yang berselisih
2). Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite
3). Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator HI

SASARAN:
Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Kerja

Indikator
2). Persentase Perusahaan yang memiliki PP
3). Persentase Perusahaan yang memiliki PKB
4). Persentase Perusahaan yang menyusun Struktur Skala Upah
4). Persentase Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

SASARAN:
Tersedianya Informasi/Lowongan Pekerjaan melalui Pemda

Indikator
Jumlah Perusahaan yang mempublikasikan lowongan kerja

SASARAN:
Meningkatnya perluasan kerja

Indikator
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis perluasan kerja

SASARAN:
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Pemberdayaan IKM dan peran serta Masyarakat

Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi

SASARAN:
Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Indikator
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri

SASARAN:
Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI)

Indikator
Jumlah Penerbitan IUI, IPU, IUKI dan IPKI

SASARAN:
Terlaksananya Pendataan Industri

Indikator
Jumlah IUI, IPU, IUKI dan IPKI

SASARAN:
Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

Indikator
Peserta yang mengikuti Bimtek

SASARAN:
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyusunan RTK Mikro

Indikator
Jumlah Perusahaan yang mengikuti Bimtek

SASARAN:
Terlaksananya Pelatihan Berbasis kompetensi melalui Pemda

Indikator
Jumlah pelatihan kompetensi dalam 1 tahun

SASARAN:
Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Pada Perusahaan

Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas

SASARAN:
Terlaksananya operasional LKS Tripartit

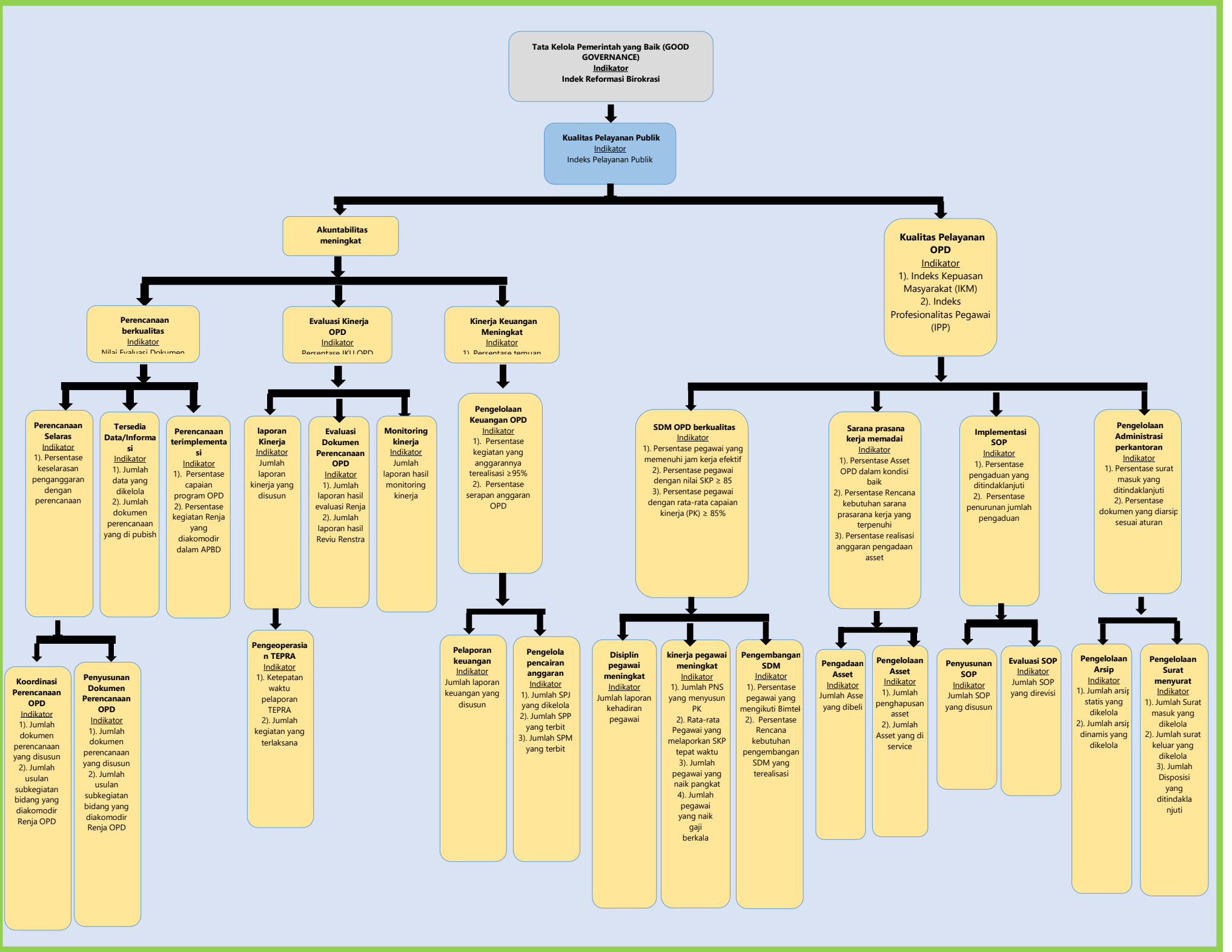
Indikator
Jumlah LKS Tripartit yang dibentuk

SASARAN:
Terlaksananya Pendataan Sarana HI

Indikator
Jumlah Laporan

SASARAN:
Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan IMTA

Indikator
Jumlah Laporan Pelayanan IMTA dalam 1 Tahun



Tata Kelola Pemerintah yang Baik (GOOD GOVERNANCE)
Indikator
Indek Reformasi Birokrasi

Kualitas Pelayanan Publik
Indikator
Indeks Pelayanan Publik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin
Indikator
Nilai AKIP Disnakerin

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Disnakerin
Indikator
Nilai Evaluasi Dokumen Perencanaan Disnakerin

Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan
Indikator
1). Persentase keselarasan penganggaran dengan perencanaan
2). Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
3). Persentase capaian program
4). Persentase kegiatan Renja yang diakomodir dalam APBD

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan OPD
Indikator
1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD
Indikator
1). Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
2). Jumlah usulan subkegiatan bidang yang diakomodir Renja OPD

Terlaksananya Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD
Indikator
1). Jumlah laporan hasil evaluasi Renja
2). Jumlah laporan hasil Reviu Renstra

Meningkatnya Capaian Kinerja Disnakerin
Indikator
Persentase IKU yang mencapai target Disnakerin

Meningkatnya Pengendalian Evaluasi Kinerja
Indikator
1). Persentase sub/kegiatan rata-rata capaian kinerja > 90 %
2). Persentase Pejabat dengan rata-rata capaian kinerja (PK) ≥ 85%
3). Persentase Laporan Kinerja yang disusun tepat waktu

Tersedianya laporan kinerja berbasis TIK (TEPRA)
Indikator
1). Ketepatan waktu pelaporan TEPRA/SYRUP
2). Jumlah kegiatan yang terlaksana

Terlaksananya Monitoring kinerja OPD
Indikator
1). Jumlah laporan hasil monitoring kinerja

Meningkatnya Kinerja Keuangan Disnakerin
Indikator
1). Persentase temuan LHP yang ditindaklanjuti
2). Persentase penurunan jumlah temuan inspektorat

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
Indikator
1). Persentase serapan anggaran OPD
2). Persentase SPJ yang terverifikasi lengkap
3). Persentase Laporan Penerimaan IMTA tepat waktu
3). Persentase Realisasi Fisik

Tersedianya Laporan keuangan
Indikator
1). Jumlah laporan keuangan yang disusun

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penganggaran
Indikator
1). Jumlah SPJ yang dikelola
2). Jumlah SPP yang terbit
3). Jumlah SPM yang terbit

Tersedianya Dokumen Penganggaran OPD
Indikator
1). Jumlah RKA yang disusun
2). Jumlah DPA yang disusun

Tersedianya Laporan Penerimaan IMTA
Indikator
1). Jumlah Laporan Penerimaan IMTA yang disusun

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Disnakerin
Indikator
1). Indeks Kepuasan Masyarakat
1). Indeks Profesionalitas

Meningkatnya Kualitas SDM
Indikator
1). Persentase pegawai yang memenuhi jam kerja efektif
2). Persentase pegawai dengan nilai SKP ≥ 85

Meningkatnya Disiplin pegawai
Indikator
Jumlah laporan kehadiran pegawai

Meningkatnya Kinerja pegawai
Indikator
1). Jumlah PNS yang menyusun PK
2). Rata-rata Pegawai yang melaporkan SKP tepat waktu
3). Jumlah pegawai yang naik pangkat
4). Jumlah pegawai yang naik gaji berkala

Terlaksananya Pengembangan SDM
Indikator
1). Persentase pegawai yang mengikuti Bimtek
2). Persentase kebutuhan pengembangan SDM yang terealisasi

Meningkatnya Pengelolaan Arsip
Indikator
1). Jumlah arsip statis yang dikelola
2). Jumlah arsip dinamis yang dikelola

Meningkatnya Pengelolaan Surat menyurat
Indikator
1). Jumlah Surat masuk yang dikelola
2). Jumlah surat keluar yang dikelola
3). Jumlah Disposisi yang ditindaklanjuti

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi perkantoran
Indikator
1). Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti
2). Persentase dokumen yang diarsip sesuai aturan

Tersedianya Sarana prasarana kerja yang memadai
Indikator
1). Persentase Asset OPD dalam kondisi baik
2). Persentase Rencana kebutuhan sarana prasarana kerja yang terpenuhi
3). Persentase realisasi anggaran pengadaan asset

Terlaksananya Pengadaan Asset
Indikator
Jumlah Asset yang dibeli

Meningkatnya Pengelolaan Asset
Indikator
1). Jumlah penghapusan asset
2). Jumlah Asset yang di service

Tersedianya Aplikasi Ketenagakerjaan
Indikator
Jumlah Aplikasi yang dibangun

Terlaksananya Pengelolaan Web Disnakerin
Indikator
Jumlah Laporan yang dipublikasi